

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tasikmalaya adalah kota kecil yang tumbuh pada era liberal kolonialisme Hindia Belanda (mulai tahun 1870). Pada era ini, pemerintah kolonial membuka lahan subur di tanah Jawa bagi perusahaan-perusahaan swasta.¹ Kolonial memberikan kebebasan dan jaminan keamanan kepada kaum kapitalis Eropa untuk menanamkan modal dengan membuka lahan perkebunan dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.² Ribuan hektar lahan subur di wilayah Priangan Timur meliputi kabupaten Sukapura, Galuh, dan Garut disewakan kepada perusahaan perkebunan berkebangsaan Eropa untuk dieksploitasi. Sementara letak geografis kota Tasikmalaya sangat strategis menjangkau lahan perkebunan di Priangan Timur. Pemerintah kolonial memanfaatkan Tasikmalaya sebagai daerah konsentrasi penyimpanan beragam produk hasil perkebunan.

Pertumbuhan kota Tasikmalaya berkaitan erat dengan industrialisasi perkebunan di wilayah Priangan Timur. Kolonial mempersiapkan kota ini untuk menyokong aktifitas ekonomi para pelaku usaha perkebunan dan para pekerja berkebangsaan Eropa.

¹ Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia Since c. 1200 fourth edition*, edisi Indonesia (Jakarta: Serambi, 2010), 271.

² Darkley, Steven. *The History of Indonesia* (London: Greenwood Press, 2005), 43.

Pada akhir abad XIX, Kolonial telah membangun berbagai sarana dan prasarana penting di kota ini. Sementara investasi bisnis perkebunan terus mengalami perkembangan. Pengusaha Eropa menanamkan modal yang cukup besar untuk membuka ribuan hektar lahan perkebunan di wilayah Tasikmalaya. *Brinkman's Cultuur-Adresboek Voor Nederlandsch-Indie: 1937 Ten Dienste Van Handel, Industrie, Nijverheid*³ mencatat bahwa sampai tahun 1937, di Tasikmalaya terdapat 80 perusahaan yang menguasai bentangan tanah subur Tasikmalaya, yang pada masa itu meliputi kewadanaan Tasikmalaja, Ciawi, Manonjaya, Singaparna, Taraju, Karangnunggal, Cikatomas, Banjar, Pangandaran dan Cijulang.

Fungsi ekonomi kota Tasikmalaya semakin kuat setelah *Staats-spoorwegen* (S.S.) berhasil menyelesaikan jalur kereta api yang menghubungkan Tasikmalaya dengan kota-kota besar di pulau Jawa pada tanggal 1 November 1894.⁴ Jalur ini sangat penting untuk memenuhi kepentingan eksploitasi ekonomi dan besarnya skala kapitalisasi dan produksi perkebunan di semua wilayah Jawa.⁵ Kereta api adalah sarana transportasi efektif dan efisien untuk distribusi hasil perkebunan. Semenjak ada stasiun kereta api, seluruh perusahaan perkebunan menjadikan daerah stasiun sebagai kantor sekaligus gudang distribusi hasil

³ *Brinkman's Cultuur-Adresboek Voor Nederlandsch-Indie 1937. Ten Dienste Van Handel, Industrie, Nijverheid* (Bandung: Brinkmans Advertentiebureau, 1937).

⁴ *Tropisch Nederland: veertiendaagsch tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Nederlandsch Oost- en West-Indië, Jaargang 4, Aflevering 14* (2 November 1931) 216-217

⁵ Darkley, Steven, *The History of Indonesia*, 44.

perkebunan. Semenjak itu, Tasikmalaya berkembang menjadi kota yang sibuk dengan ragam aktifitas perekonomian baik industri maupun perdagangan.

Secara sosial, industrialisasi perkebunan mendorong migrasi bangsa Eropa, Tiong Hoa dan Asia Timur lainnya ke kota Tasikmalaya. Sejak akhir abad XIX, kota Tasikmalaya telah dihuni oleh beragam suku bangsa, pribumi Sunda, Eropa, Jawa, Tiong Hoa, dan Asia Timur lainnya. Kehadiran bangsa asing memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mewarnai dinamika sosial di kota Tasikmalaya. Sampai tahun 1900, penduduk berkebangsaan Eropa di Tasikmalaya berjumlah 94 orang, sementara Tiong Hoa berjumlah 371 orang.⁶ Sementara tahun 1930, jumlahnya bertambah pesat, dari total 886.973 orang penduduk, 658 orang Eropa dan 4.617 orang Tiong Hoa.⁷ Sebagai penguasa, Bangsa Eropa memiliki pengaruh yang paling fundamental dalam perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sementara, bangsa Tiong Hoa dan Asia Timur ikut berperan dalam perkembangan industri dan perdagangan. Dialog bangsa pribumi dan bangsa asing, mendorong modernisasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Tasikmalaya.

⁶ Senelleman, John F. (ed), *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie, met Medewerking van Verschilnde Ambtenaren, Geleerden en Officieren* (Leiden: Martinus Nijhoff – E.J. Brill, 1905), *Vierde Deel*, 284.

⁷ Stibbe, D.G. & Sandbergen, F.J.W.H. (eds) *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, S-Gravenhage; *Tweede Druk*, Matinus Nijhoff, 1939), 1651.

Memasuki abad XX, Fungsi politik kota Tasikmalaya menjadi strategis setelah Pemerintah Kolonial menjadikannya sebagai ibu kota kabupaten Sukapura yang sebelumnya berpusat di Manonjaya. Pengukuhkan Tasikmalaya sebagai pusat pemerintahan kabupaten Sukapura tersebut berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor het Jaar 1901 No. 327* tertanggal 1 oktober 1901.⁸ Perpindahan ibu kota ini terjadi pada masa Pemerintahan Bupati R.A.A. Prawirahadiningrat, yang menjabat sejak tahun 1901 s.d. 1908. Sejak saat itu, pemerintah mulai membangun sarana dan prasarana pemerintahan di kota Tasikmalaya, ditandai dengan pembangunan Pendopo Kabupaten, kantor pemerintahan, alun-alun, pasar, kaum (mesjid agung) dan pembangunan fasilitas publik lainnya.

Pada Tahun 1913, Pemerintah Hindia Belanda, mengukuhkan Tasikmalaya menjadi nama kabupaten, menggantikan nama Sukapura. Perubahan nama tersebut, diundangkan melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor het Jaar 1913 No.356*.⁹ Pergantian nama kabupaten Sukapura menjadi Tasikmalaya terjadi pada masa Bupati R.A.A. Wiratanoeningrat yang memerintah dari tahun 1908 sampai 1937.¹⁰ Pada saat itu, kabupaten Tasikmalaya memiliki hamparan

⁸ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor het Jaar 1901 No. 327*.

⁹ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor het Jaar 1913. No. 356*.

¹⁰ Dalam menjalankan pemerintahannya, Bupati dibantu dibantu oleh, seorang *Patih*, bernama R. Ranga Wiriadinata; *Pejabat Bupati Kelas I*, R. Kosasih Soerakoesoemah; dan *Pembantu sekretaris bupati*, R. Hardjadiparta. Kabupaten Tasikmalaya terbagi menjadi 10 Distrik (*kawadanaan*), meliputi; *Kawadanaan* Tasikmalaya dipimpin oleh R. Adikoesoemah; *Kawadanaan*

wilayah seluas 4.608 KM². Batas wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Garut; sebelah selatan samudra Hindia; sebelah utara, bentangan sungai Citanduy yang membatasi Tasikmalaya dengan kabupaten Ciamis dan Majalengka; sementara bentangan sungai Citanduy sebelah timur adalah batas Tasikmalaya dengan Jawa Tengah.¹¹ Wilayah administrasi pemerintahan kabupaten Tasikmalaya terbagi ke dalam 10 Distrik (*kawadanaan*) yang meliputi; Tasikmalaya, Ciawi, Manonjaya, Singaparna, Taraju, Karangnunggal, Cikatomas, Banjar, Pangandaran dan Cijulang.¹²

Tasikmalaya adalah kabupaten yang sangat subur dengan beragam kekayaan alam. Kapitalis Eropa sangat berambisi untuk mengeksploitasi kekayaan alam di seluruh wilayah Tasikmalaya. Untuk memfasilitasi eksploitasi dalam skala besar, Kolonial membangun jalur kereta api yang mampu menjangkau seluruh wilayah perkebunan di Tasikmalaya. Pada tahun 1904 s.d. 1920, *Staats-spoorwegen* (S.S.) membangun jalur kereta api

Tjiawi dipimpin oleh R. Kandoeroean Soemadipradja; *Kawadanaan* Manondjaja dipimpin oleh R. Martahadisoerja; *Kawadanaan* Singaparna dipimpin oleh R. Wiradipoetra; *Kawadanaan* Taradjoe dipimpin oleh R. Koesnidar; *Kawadanaan* Karangnunggal dipimpin oleh R. Naipin; *Kawadanaan* Tjikatomas dipimpin oleh R. Soemadiningrat; *Kawadanaan* Banjar dipimpin oleh R. Rangga Mohammad Soeria Nata Nagara; *Kawadanaan* Pangandaran dipimpin oleh R. Prawirasastra; dan *Kawadanaan* Tjidjoelang dipimpin oleh R. Somawirja. Lihat, Lihat, *Regreerings Almanak voor Nederlansch-Indie 1931, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalie*. (Batavia: Landsdrukkerij, 1931), 345.

¹¹ Stibbe, D.G., *Encyclopaedie van Netherlansch-Indie*, 1651.

¹² *Regreerings Almanak voor Nederlansch-Indie*, 345.

Tasikmalaya-Singaparna,¹³ untuk memudahkan distribusi hasil perkebunan di sebelah barat Tasikmalaya yang sangat melimpah. Sementara tahun 1911 s.d. 1921, Pemerintah kolonial berani mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendanai mega proyek jalur kereta api Banjar-Parigi via Kalipucang sampai Cijulang.¹⁴ Proyek itu menghabiskan biaya sebesar f.9.583.421.¹⁵ Jalur kereta api tersebut menjangkau wilayah Tasikmalaya bagian timur, selatan dan tenggara.

Pada tanggal 17 Oktober Ratu Wihelmina mendeklarasikan formulasi kebijakan baru dalam pidato formalnya di hadapan Parlemen Belanda mengenai formulasi kebijakan *Ethische Politiek*.¹⁶ Kebijakan ini buah dari desakan aktivis kemanusiaan di negeri Belanda. Mereka melancarkan kritik terhadap pemerintahan yang terus-menerus mengeksploitasi kekayaan bangsa pribumi. Sementara bangsa pribumi menderita kemelaratan, kebodohan, dan keterbelakangan. Beberapa nama aktivis kemanusiaan, yang menyuarakan “politik balas budi” dan kesejahteraan bangsa jajahan, diantaranya Max Havelar, C. Th. van de Venter, Pieter Boorshoof, dan seorang orientalis populer bernama Snouck Hurgronje. Pada tahun 1902 Alexander W.F. Indenburg yang memegang jabatan Menteri Urusan Daerah

¹³ *Indie, Geillustreerd Tijdschrift voor Nederland en Kolonien* (Weltevreden: N.V. Boekhandel en Drukkerij G. Kolff & Co, Edisi 1 April 1925), 9-10.

¹⁴ *Indie, Geillustreerd Tijdschrift voor Nederland en Kolonien*, 9

¹⁵ Mulyana, Agus, *Titik Balik Historiografi di Indonesia* et. al. (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2008), 66.

¹⁶ Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*,

Jajahan menerapkan kebijakan ini. Pelaksanaan kebijakan politik etis ini diformulasikan ke dalam tiga prinsip yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi.¹⁷

Deklarasi kebijakan politik etis adalah genderang penanda diawalnya era baru Tasikmalaya. Dua dekade pasca kebijakan etis, Tasikmalaya berkembang menjadi kota modern yang ramai dengan hiruk-pikuk pergerakan sosial, politik dan ekonomi. Formulasi kebijakan etis telah memberikan dampak langsung pada modernisasi dan kesadaran pergerakan di kalangan masyarakat pribumi. Perhimpunan pergerakan di Tasikmalaya pun berkembang dengan sangat mengagumkan. Generasi “produk era balas budi” berhimpun dalam berbagai organisasi pergerakan yang aktif dan progresif menyuarakan kesadaran identitas, nasionalisme, emansipasi, demokrasi dan modernitas. Situasi ini telah mendorong transformasi pemerintahan yang awalnya tradisonal feodal menjadi pemerintahan modern yang membuka ruang partisipasi.

Periode 1918 sampai dengan 1942 adalah fase penting proses dinamika pergerakan sosial, politik dan ekonomi bangsa pribumi dalam usahanya memperjuangkan kedaulatan dan otonomi. Sebuah artikel dalam surat kabar *Sipatahoenan* yang terbit pada tahun 1929 memberikan gambaran tentang imperialisme dan penjajahan bangsa Eropa sebagaimana berikut,

¹⁷ Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, 328.

Imperialisme Eropa heunteu eureun-eureun ihtiar sangkan tambah-tambah kaoentoengannana beubeunangan ti tanah pataloekan tea, geusan kaoentoengan nagarana. Sakoer djalma oerang tanah pataloekan tangtoe bisa ngarasakeun koemaha tapakna sarta koemaha karasana, ngabeulitna koloniale politiek anoe sakitoe pageuhna. Njeuri peurihna geus kapanggih, lara wirangna geus kasorang... Sagala pangatoeran, babakoena bagbagan paparentahan, moenggoehing di tanah pataloekan mah istoening dialas, henteu meunang noeroetkeun kahajang sorangan, tapi koedoe noeroetkeun kahajangna noe nalokekkeun tea bae [Imperialisme Eropa tidak berhenti berupaya agar mendapatkan keuntungan dari tanah jajahan, untuk keuntungan negaranya sendiri. Setiap orang di tanah jajahan tentu bisa merasakan bagaimana dampaknya dan bagaimana rasanya, menjeratnya politik kolonial yang sangat kuat. Sakit dan pedihnya sudah terasa, sakit dari rasa malunya sudah terasa.. Segala bentuk aturan terutama urusan pemerintahan, berdasarkan aturan penjajah itu dialas, tidak boleh berdasarkan kehendak sendiri, tapi harus patuh pada keinginan penjajah].¹⁸

Sampai dengan 1942, industrialisasi perkebunan terus dikembangkan. Kapitalisme semakin kuat bercokol. Infrastruktur untuk memfasilitasi kepentingan eksploitasi ekonomi terus dikembangkan. Keberadaan jalur kereta api telah mendorong Tasikmalaya pada era keterbukaan. Terbangunnya jalur kereta api yang menghubungkan Tasikmalaya dengan kota-kota besar di pulau Jawa, telah mendorong keterbukaan dalam segala sendi kehidupan. Meski sebagian besar rakyat pribumi Tasikmalaya hanya menjadi kuli rendahan di lahan perkebunan, namun produktifitas ekonomi mulai tumbuh berkembang. Keberadaan jalur kereta api telah memudahkan mobilitas perdagangan beragam produk ekonomi kreatif yang dihasilkan rakyat Tasikmalaya.

¹⁸ *Sipatahoenan*, No. 59, 1929, 1

Aktifitas perdagangan di pasar-pasar Jawa tahun 1900 s.d. 1912-an, telah membawa para haji (pengusaha) di Tasikmalaya pada kesadaran berorganisasi dan berhimpun dalam wadah pergerakan. Para haji itu bergabung dengan Sarekat Islam (SI) berdasarkan motif politik dan ekonomi. Mereka membutuhkan proteksi ekonomi yang saat itu tengah bersaing dengan pedagang Tiong Hoa. Namun kemudian berkembang, mereka merangkul para tokoh agama untuk bergabung dalam tubuh SI. Keterlibatan para *kiayi* dan guru ngaji disinyalir telah mempercepat berkembangnya SI sampai diikuti oleh kalangan jelata.

SI adalah gerakan revolusioner yang membawa Tasikmalaya pada sebuah episode kebangkitan perhimpunan pergerakan. Perhimpunan pergerakan ini memiliki visi yang sesuai dengan semangat sosial politik, ekonomi, dan budaya rakyat Tasikmalaya. Keberadaan SI di Tasikmalaya mendorong tumbuhnya kesadaran, cita-cita dan usaha revolusioner untuk mewujudkan pemerintahan yang merdeka di tengah fakta penjajahan kolonial dan aristokrasi *menak* pribumi. SI Tasikmalaya adalah gerakan non-kooperatif yang menolak untuk berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pada tahun 1919, organisasi ini memicu gejolak nasional di Hindia Belanda. Presiden SI Manonjaya, H. Ismael, secara rahasia melakukan mobilisasi ribuan orang di karesidenan Priangan untuk melakukan aksi pemberontakan terhadap pemerintah kolonial, yang bernama SI *afdeeling B*. Namun, gerakan ini kandas dan terbongkar setelah sebagian anggotanya terlibat dalam tragedi

berdarah H. Hasan Cimareme Leles Garut. Cita-cita revolusi kemudian dianut oleh organisasi pergerakan *Sarekat Rakjat* (SR)¹⁹. Namun, SR pun mengalami nasib yang sama. Usaha pemberontakannya digagalkan kolonial pada tahun 1926.

Pasca dua peristiwa itu, organisasi pergerakan bersikap non-kooperatif dengan pemerintah relatif kurang berkembang di Tasikmalaya. Organisasi pergerakan yang tumbuh tidak lagi mengarah pada cita-cita revolusi dan pemberontakan fisik. Perhimpunan pergerakan lebih bersikap moderat dan kooperatif. Mulai paruh dekade 20-an, organisasi pergerakan di Tasikmalaya cenderung bersikap moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial. Organisasi ini, aktif melakukan propaganda emansipatoris dengan langkah moderat dan kooperatif. Mereka bersikap kritis sekaligus menyokong kebijakan pemerintah kolonial. Di

¹⁹ Yong Mun Cheong berpendapat, Sejak tahun 1916 SI yang memiliki pandangan sosialis beraliansi dengan partai komunis I.S.D.V. Setelah SI, melemah paska Afdeeling B Affair 1919, pengurus CSI yang pro-Komunis membentuk *Sarekat Rakjat*. Diantara tokoh SI yang bergabung dengan P.K.I adalah Gunawan, dia menggagas nama *Sarekat Rakjat*. Lebih lanjut dalam buku Yong Mun Cheong, "*Gunawan, the communist leader, suggested that the confession of Persatuan Sarekat Islam be dropped in favour of the name Sarekat Rakjat. initially, this suggestion was not adopted because it was feared that would be too radical a step to take. but eventually, the name sarekat rakjat was used, and branches were established in the smaller towns and villages all over Java, including those in the parahyangan*" [Gunawan, pemimpin komunis, mengusulkan agar nama Persatuan Sarekat Islam dihapuskan dan diganti dengan nama Sarekat Rakjat. Awalnya, usulan ini tidak diterima karena dikhawatirkan terlalu radikal. Namun, akhirnya, nama Sarekat Rakjat digunakan, dan cabang-cabangnya didirikan di kota-kota kecil dan desa-desa di seluruh Jawa, termasuk di Parahyangan]. Cheong, Yong Mun, *Conflicts within the Prijaji World of the Parahyangan in West Java 1914-1927. Field report Series I.* (Singapore: The Institute of Southeast Asia, 1973). 31.

Tasikmalaya, organisasi seperti ini banyak memelopori kemajuan dibidang sosial ekonomi, pendidikan, sosial-keagamaan dan gerakan literasi. Kelompok kooperatif aktif berkecimpung dalam wadah politik yang diakui oleh pemerintah kolonial. Beberapa organisasi kooperatif ini adalah *Pagoejoeban Pasoendan* (PP), *Idharu Baiatil Muluki wal Umara* (IBMU), *Pehimpoenan Guru Ngadji* (PGN), *Boedi Oetomo* (BO), *Nahdlatol Oelama* (NO), *Moehamadijah*, *Persatoean Islam* (PERSIS), *Ahmadijah*, berbagai organisasi perhimpunan koperasi dan organ-organ lainnya.

Seorang aktifis PP yang juga inisiator organisasi pergerakan bernama *Somah Moerba*, Bakrie Soeraatmadja, menggambarkan riuh organisasi pergerakan kooperatif dan non-kooperatif dalam sebuah artikel yang berjudul “*Kamerdikaan*”. Bakrie mengungkapkan bahwa, *Geus moal aja noe moengkir deui, jen sakoer pagoejoeban politiek anoe make dasar kabangsaan mah, djoetjoengna pisan sanadjan anoe make djalan koemaha bae, pada ngabogaan angen-angen kana kamedikaan, hajang nagaraksa lemah tjaina, sarta ngatoer hiroep kumbuhna koe sorangan, oelah goemantoeng ka batoer, djadi pataloekan nagara dengan* [Sudah tidak ada yang bisa memungkir lagi, bahwa seluruh paguyuban politik yang memakai dasar kebangsaan, tujuan utamanya meskipun menggunakan jalan apapun, memiliki cita-cita untuk kemerdekaan, hendak memelihara tanah airnya, serta mengelola kehidupannya sendiri,

tidak bergantung kepada orang lain, jadi jajahan bangsa asing].²⁰

Pagoejoeban Pasoendan (PP) mengambil peran sosial dan politik yang paling strategis mewakili entitas pribumi Tasikmalaya. PP didirikan pada tanggal 20 juli tahun 1913 di Jakarta. Pada awal kelahirannya, PP tidak memiliki haluan politik. PP didirikan hanya untuk tujuan sosial dan kebudayaan. Mulai tahun 1919, PP mulai memasuki kancah politik dengan berusaha menempatkan anggotanya di *Volksraad*.²¹ PP sudah memiliki cabang di Tasikmalaya sejak tahun 1915. Namun, PP mulai mengeliat di Tasikmalaya pada tahun 1920-an. Pada masa ini, banyak inisiasi tokoh PP Tasikmalaya menjadi inspirasi bagi organisasi di daerah-daerah lain di Jawa Barat.

Perkembangan organisasi pergerakan di Tasikmalaya ditopang kehadiran media (pers) yang dikembangkan oleh kalangan terpelajar. Berbagai organisasi pergerakan yang berpengaruh di Tasikmalaya memanfaatkan koran sebagai media propaganda. Gairah perkembangan pers lokal Tasikmalaya mewarnai dinamika organisasi pergerakan sampai tahun 1942. Misalnya SI Priangan yang menerbitkan beberapa edisi koran berbahasa Sunda “*Sora Merdika*” di Tasikmalaya. PP berhasil memelopori media massa berbahasa Sunda sebagai corong propaganda pergerakan mereka. Pada tahun 1923, R. Soetisna Sendjaja menggagas sebuah koran berbahasa sunda yang sangat

²⁰ *Sipatahoenan* no. 59 (Tasikmalaja: 1929), 1.

²¹ Falah, Miftahul, *Sejarah Kota Tasikmalaya 1820-1942* (Bandung: Uga Tatar Sunda, 2010), 78.

fenomenal bertajuk *Sipatahoenan*. R. Soetisna Sendjaja menjadikan *Sipatahoenan* sebagai corong propaganda ide kemajuan dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Pandangan kritisnya dalam *Sipatahoenan*, mendapat tempat di hati pembaca orang Sunda tatar Pasundan. Pada tanggal 10 februari 1939, *Algemeen Handelsblad*, koran Belanda terbitan Amsterdam, memberikan perhatian khusus terhadap *Sipatahoenan* yang tumbuh menjadi koran besar dengan oplag 5.800 eksemplar perhari.²²

Sipatahoenan karya R. Soetisna Sendjaja menandai sebuah revolusi intelektual masyarakat Sunda modern. Koran ini sukses menggiring masyarakat pada keterbukaan informasi baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Kelahiran *Sipatahoenan* menjadikan Tasikmalaya sebagai episentrum perkembangan intelektual di tatar Pasundan. Kelahiran *Sipatahoenan* pun, mendorong karya jurnalistik berbahasa Sunda memasuki era kegemilangan. Kehadirannya telah memicu munculnya insan jurnalistik yang menerbitkan banyak koran dan majalah lokal. Fenomena itu merambah ke kota-kota kecil di Jawa Barat.

Pada tahun dekade 20-an, pergerakan Tasikmalaya menemukan kematangan intelektualnya. Tahapan perkembangan intelektual pergerakan terekam dengan rapih dalam sebuah koran bertajuk "*Sipatahoenan*" yang dirintis oleh R. Soetisna Sendjaja & R. Bakrie Soeraatmadja". Wacana pergerakan dalam *daagblad* ini

²² Lihat *Algemeen Handelsblad* /10 februari 1939

berusaha mendialogkan antara *mainstreams* ideologi yang berkembang pada saat itu, yaitu islam, sunda, nasionalisme dan sosialisme. Gagasan tersebut diilhami dari gerakan pembaharuan pan-Islamisme di Timur Tengah; keberhasilan revolusi sosialisme di Tiongkok; dan, revolusi nasionalisme di Turki. Selain itu, keberhasilan revolusi Perancis pun menjadi referensi gagasan negara republik dan demokrasi.

Pada tahun 1925, para kiayi Tasikmalaya yang berhimpun dalam PGN menerbitkan majalah berbahasa Sunda *Al-Imtisal* yang membahas berbagai problem keagamaan. Disusul oleh NO Tasikmalaya yang menerbitkan majalah berbahasa Sunda *Al-Mawaidz* pada tahun 1928. Terdapat puluhan karya jurnalistik lainnya yang terbit di Tasikmalaya dalam rentang waktu 1920-1942, baik berbahasa Sunda maupun Melayu. Hal tersebut menandakan hebatnya dinamika organisasi pergerakan di Tasikmalaya.

Demikianlah ulasan ringkas mengenai pertumbuhan dan perkembangan perhimpunan pergerakan di Tasikmalaya sejak tahun 1912. Ringkasan riset pendahuluan di atas, cukup memberikan gambaran mengenai dinamika pergerakan organisasi di Tasikmalaya dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial sejak tahun 1912-1942. Masih dibutuhkan kajian yang lebih mendalam mengenai bahasan ini. Sehingga, kajian yang dihasilkan betul-betul mampu memberikan pemahaman dan penjelasan yang utuh dan detail. Maka diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami

dan menjelaskan dinamika pertumbuhan dan perkembangan perhimpunan pergerakan sejak tahun 1912 sampai dengan tahun 1942 dan dampaknya terhadap perubahan sosial, politik dan ekonomi di Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini hendak memahami dan menjelaskan dinamika perhimpunan pergerakan di Tasikmalaya, dalam rentang waktu tahun 1912 sampai dengan masa berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1942, serta dampaknya terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Tasikmalaya.

Selanjutnya, agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan mendalam, masalah pokok tersebut secara khusus dirinci kedalam pertanyaan penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana lanskap struktur sosial politik dan ekonomi Tasikmalaya pada era kolonialisme?
2. Bagaimana dinamika perhimpunan pergerakan di Tasikmalaya pada 1912-1926?
3. Bagaimana dinamika perhimpunan pergerakan di Tasikmalaya pasca reformasi pemerintahan lokal tahun 1926-1942?

C. Tujuan Penelitian

1. Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah memahami dan menjelaskan dinamika perhimpunan pergerakan sejak tahun 1912 sampai dengan tahun 1942 dan dampaknya terhadap perubahan struktur sosial, politik dan ekonomi di Tasikmalaya.

2. Khusus

- a. Memahami dan menjelaskan struktur sosial politik dan ekonomi Tasikmalaya pada era kolonial.
- b. Memahami dan menjelaskan dinamika pembentukan gagasan ideologi; para tokoh; aksi kolektif; dan media instrumen pergerakan.
- c. Memahami dan menjelaskan pengaruh pergumulan (interaksi) pergerakan perubahan struktur sosial, politik, dan ekonomi Tasikmalaya sampai dengan tahun 1942.

D. Metode Penelitian

Penelitian dengan tema *Dinamika Perhimpunan Pergerakan di Tasikmalaya tahun 1912 sampai dengan 1942* menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber dihimpun dari Perpustakaan Nasional RI; Arsip Nasional RI; dan situs resmi menyediakan sumber-sumber resmi kolonial Belanda.

Sumber primer tentang dinamika sosial politik dan ekonomi di Tasikmalaya dalam rentang waktu 1912-1942, dihimpun dari koran dan majalah, diantaranya:

1. Koleksi koran *Sora Merdika*, berbahasa Sunda, yang terbit sepanjang tahun 1920.
2. Koleksi koran *Matahari*. Pemimpin redaksi Moh. Sanoesi, berbahasa Sunda, terbit 1921-1923.
3. Koleksi koran *Pasoendan*, berbahasa Sunda, terbit tahun 1919-1920.
4. Koleksi koran *Padjadjaran*. Pemimpin redaksi Moh. Sanoesi, berbahasa Sunda, terbit tahun 1918-1919.
5. Koleksi koran *Kaoem Moeda*. Pemimpin redaksi Abdoel Moeis, berbahasa Melayu, yang terbit tahun 1919-1920.
6. Koleksi koran *Sipatahoenan*; Pemimpin redaksi R.d. Soetisna Sendjaja; berbahasa Sunda terbit 1923-1942.
7. Koleksi koran *Ichtiar*; Pemimpin Redaksi A.S. Tanoewiredja; bahasa Melayu; terbit 1935-1936.
8. Koleksi koran *Tawekal*; Pemimpin Redaksi Harsono Mangoen Adiwangsa; bahasa Sunda/Melayu; terbit 1936-1942.
9. Koleksi koran *Timbangan*; Pemimpin Redaksi A.S. Tanoewiredja; bahasa Melayu; terbit 1937-1938.
10. Koleksi koran *Balaka*; Pemimpin Redaksi Ikik Wiradikarta; bahasa Sunda; terbit 1937-1940.

11. Koleksi koran *Toemba!*; Pemimpin Redaksi Harsono Mangoen Adiwangsa; bahasa Sunda.
12. Koleksi koran *Lembana*; Pemimpin Redaksi Kahman Atmadinata; bahasa Sunda; terbit 1938-1939.
13. Koleksi buku, majalah dan koran Belanda yang diakses melalui delpher.nl
14. *Volksalmanak Soenda 1919 yang dicetak oleh Batavia-Landsdrukkerij 1918.*

Penelitian juga menggunakan sumber primer berbentuk arsip yang diterbitkan secara resmi oleh lembaga dan pemerintah kolonial, diantaranya:

1. *Decentralisatie-Wetgeving*. Weltevreden; Albrecht & Co, 1921.
2. *Departement van Landbouw In Nederlandsch-Indie. Thee-Cultuur in der Preangerregenschapen*. Buitenzorg: Drukkerij Departement van Landbouw, 1910.
3. *Geheim Rapport. Politieke Nota over de Partij Kommunist Indonesia 1927. Parket van den Procureur-Generaal Algemeene Recherchedienst.*
4. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda tahun 1839-1848*. ANRI; Jakarta 1973.
5. *Kongres Paguyuban Pasundan di Tasikmalaya tahun 1925. Laporan RA. Kern dari Koleksi Arsip di Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, Leiden, Negeri Belanda*. Oleh Didi Suryadi. Seri Penerbitan Sumber Sejarah No. 1.

Dokumentasi Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran,
Bandung Pebruari 1981.

6. *Laporan-Laporan tentang Protes Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX*. ANRI, Jakarta, 1981.
7. *Memori Serah Terima Jabatan 1931-1940 Jawa Barat I*. ANRI; Jakarta, 1980.
8. *Regreerings Almanak voor Nederlansch-Indie: Tweede Gedeelte: Kalender en Personalie*. dari tahun 1920-1931.
9. *Sarekat Islam Congres (4e National Congres) 26 oct - 2 nov 1919 te Sorabaja*. Weltevreden; Landsdrukkerij, 1920.
10. *Sarekat Islam Lokal, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No.7*. Jakarta: ANRI, 1975.
11. *Staatblad van Netherlands Indie voor het Jaar 1925 No. 391*
12. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor het Jaar 1901 No. 327*.
13. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor het Jaar 1913. No. 356*
14. *Statistiek der residentie Preanger Regentschappen 1837, Preanger 29a/1 1837*, ANRI.

Sumber sekunder dihimpun untuk memperkaya analisis dalam memahami dinamika sosial politik dan ekonomi di Tasikmalaya 1912-1942. Sumber tersebut diantaranya:

1. *Boekoe Inlandsch Reglement*. Toko F.B.SMITS; Batavia 1904.

2. D.G. Stibbe en Mr.Dr.F.J.W.H. Sandbergen. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie, Jilid I, II, III dan IV. Tweede Druk.* „S-Gravenhage; Martinus Nijhoff, 1939.
3. F. De Haan, *Preanger: De Preanger-Regentschappen onder het Netherlansch Bestuur tot 1811. Jilid I, II, III dan IV.* Uitgegeven Door het Bataviasch Genootschap van Kunseten en Wetenschappen, 1912.
4. F. Wiggers. *Reglemen Boemipoetra/ Het Inlandsche Regelement* (stbl 1926 No.559). Balai Pustaka; Batavia, 1932.
5. J. Th. Petrus Blumberger. *De Communistische Beweging in Nederlandsch-Indie.* Haarlem; H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1935.
6. J. Th. Petrus Blumberger. *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie.* s-Gravenhage, 1931.
7. J. W. M. Kerchman. *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch Indie 1905-1930. Vereeniging door Locale Belangen.* Weltevreden; G. Kolff & Co., 1930.
8. John F. Senelleman, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie, met Medewerking van Verschilnde Ambtenaren, Geleerden en Officirien, Jilid I dan II.* Leiden: Martinus Nijhoff – E.J. Brill, 1905.
9. Mr. C.C. Van Helsdingen Jr. *De Volksraad, Geschiedkundige Toelichting en Practische Bewerking de Voorschriften Betreffende de Volksraad.* Batavia; NV. De Verwachting, 1917.

10. Mr. H. D. Van Werkum. *Provinciaal = En Regentschaprecht*. Semarang; G.C.T. Van Dorp & Co. N.V., 1934.
11. Mr. W.K.S. Van Haastert. *De Sarekat Islam*. Weltevreden; Albrecht & Co., 1916.
12. *Provincie jeung Kaboepaten. De Bestuur te Bandoeng van de Venereeniging Pasoendan en OSVIA*. Bandung; N.V. Mij. Vorkink, 1925.
13. R.M. Margono Djojohadikoesoemo. *Tien Jaren Coöperatie-Voorlichting Vanwege De Overheid 1930-1940*. Batavia; Volkslectuur, 1940.
14. S. De Graaff. *Parlementaire Geschiedenis van De Wet Op De Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie 1925*. S-Gravenhage; Martinus Nijhoff, 1938.
15. Soeria Nata Atmadja. *De Regenten-Positie*. Bandoeng: Uitgave A.C. nix & Co, 1940.

Setelah sumber terhimpun, selanjutnya peneliti melakukan proses kritik baik internal maupun eksternal untuk memastikan autentitas dan kredibilitas sumber. Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi atau penafsiran sejarah. Tahap ini seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Pada tahapan ini, peneliti melakukan interpretasi verbal, teknis, logis, psikologis dan juga faktual berdasarkan sumber yang terhimpun.

Hasil interpretasi atas fakta-fakta yang terdapat dalam sumber primer dan sekunder selanjutnya disusun dan dirangkai menjadi sesuatu yang harmonis dan logis, dalam sebuah

historiografi. Tahapan ini adalah langkah penyusunan narasi sejarah dengan cara merangkaikan fakta-fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis.

Historiografi tema *Dinamika Perhimpunan Pergerakan di Tasikmalaya 1912-1942* akan dijelaskan secara kronologis dan diakronis dalam tiga sub pokok bahasan berikut;

1. **Lanskap Sosial Politik dan Ekonomi Tasikmalaya Pada Era Kolonial.**

Pembahasan berisi penjelasan mengenai panggung historis Tasikmalaya berdasarkan dinamika struktur sosial politik dan ekonomi sepanjang era kolonial. Pembahasan akan didadarkan dalam Bab II. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan akar historis sistem aristokrasi dan feodalisme terbentuk; menjelaskan peran, fungsi, dan relasi sosial politik dan ekonomi antara pemerintah kolonial, aristokrat pribumi dan rakyatnya; dan, menjelaskan mobilitas sosial politik dan ekonomi rakyat; menjelaskan aktor penting yang mendorong kebangkitan pergerakan sosial politik & ekonomi di awal abad 20.

2. **Masa Non-Kooperatif Perhimpunan Pergerakan di Tasikmalaya 1912-1926.**

Penjelasan historis mengenai tahap awal bangkitnya perhimpunan pergerakan di Tasikmalaya pada tahun 1912-1926. Berdasarkan hasil interpretasi atas sumber-sumber data yang ditemukan, ada fase ini dinamika perhimpunan

pergerakan di Tasikmalaya didominasi oleh Sarekat Islam (SI) dan Sarekat Rakyat (SR). Secara mendasar kedua pergerakan ini memiliki tujuan revolusioner. Sehingga keduanya memiliki sikap politik yang non-kooperatif, enggan berkompromi dengan penguasa lokal dan pemerintah kolonial. Kedua perhimpunan pergerakan ini sama-sama mengembangkan ide dan semangat revolusi dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa pribumi. Aksi politik pemberontakan dengan target penggulingan sistem kolonial menjadi pilihan politik pada fase ini. Penjelasan akan didadarkan pada BAB III.

3. Masa Kooperatif Perhimpunan Pergerakan di Tasikmalaya 1926-1942.

Penjelasan historis mengenai perkembangan perhimpunan pergerakan di Tasikmalaya pada tahun 1926-1942. Berdasarkan hasil penelaahan dan penafsiran atas sumber-sumber yang terhimpun, pada fase ini secara umum pergerakan di Tasikmalaya bersikap kooperatif dengan aristokrat lokal dan pemerintah kolonial. Dalam bidang politik, perhimpunan pergerakan lebih cenderung mengembangkan ide-ide demokratisasi. Pada fase ini pergerakan memilih ikut bergabung dalam wadah politik semi-parlemen yang disiapkan dalam sistem kolonial. Sementara pergerakan ekonomi berkembang pesat, ditandai tumbuhnya perhimpunan ekonomi koperasi yang menopang produktifitas ekonomi

bangsa pribumi. Pada bagian ini *Pagjoeban Pasoendan* (PP) sangat mewarnai dinamika pergerakan sosial politik dan ekonomi di Tasikmalaya. Penjelasan akan didadarkan pada BAB IV.

E. Landasan Teori

Penjelasan historis mengenai perhimpunan pergerakan di Tasikmalaya tahun 1912-1942, akan menggunakan metodologi strukturistik. Dalam metodologi strukturistik, peristiwa dan struktur tidak bersifat dikotomis dan dualistik, tetapi merupakan suatu jalinan dialektika metodologi yang simbiotik, di antara keduanya saling melengkapi sebagai satu kesatuan metodologi.²³ Peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur sosial, sedangkan struktur sosial mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan itu. Manusia dilahirkan dalam struktur sosial tertentu dan memiliki kemampuan untuk mengubah struktur sosial di mana ia berasal.²⁴

Strukturisme meneguhkan peranan *agency* sebagai faktor determinan dalam mentransformasi dan mereproduksi perubahan struktur sosial. Karena demikian pentingnya unsur individu atau kelompok sebagai faktor yang aktif dalam metodologi strukturistik maka unsur ini perlu ditelaah lebih jauh. Kekuatan untuk

²³ Leirissa, RZ., *Metodologi Strukturis dalam Ilmu Sejarah*. Kumpulan Karangan: tidak diterbitkan, 1999.

²⁴ Lloyd, Christopher, *The Structure of History* (Blackwell, Oxford and Cambridge: 1993), 38-40.

mengubah struktur sosial itu terletak pada apa yang disebut dengan 'agency'²⁵ dan 'mentalite'.²⁶ Sedangkan secara ontologis, struktur sosial memiliki kekuatan yang mengekang sekaligus menentukan dan *agency* yang berusaha mengubah struktur itu memiliki kemampuan, sekaligus kemauan, untuk mengubah struktur sosial.

Interaksi dan ketegangan antara *agency* yang mengubah dengan struktur sosial yang menentukan inilah yang menjadi pokok dalam metodologi strukturistik.²⁷ Maka, tujuan utama dari metodologi ini adalah menemukan *causal power* yang obyektif, yang diperoleh lewat analisis atas interaksi antara *agency* yang mengubah dan struktur sosial yang menentukan itu.²⁸ Maka terdapat empat unsur pokok dalam metodologi strukturistik yang perlu dijelaskan, yaitu struktur sosial yang *constraining*, *agency* yang *enabling*, *mentalite* dan *causal power*.

Aplikasi pendekatan strukturistik dalam penelitian Dinamika Perhimpunan Pergerakan di Tasikmalaya tahun 1912-1942 digunakan untuk menganalisis setiap segmen historis dari keseluruhan pembahasan. Diharapkan, pendekatan ini dapat memberikan gambaran logis atas fakta-fakta historis yang menjadi

²⁵*Agency* adalah kekuatan otonom dari suatu struktur sosial yang memiliki kemampuan untuk mereproduksi maupun mentransformasi struktur sosial. Lihat Lloyd, 93.

²⁶*Mentalite* adalah faktor yang memotivasi, mendorong, menyalurkan, dan mendominasi tindakan-tindakan *agency*. Konsep *mentalite* berkaitan erat dengan konsep budaya yang mencakup ide-ide, ideologi, dan budaya itu sendiri. Lihat Lloyd, *The Structure of History*, 96-98.

²⁷ Lloyd, *The Structure of History*, 93-100

²⁸ Leirissa, RZ., *Metodologi Strukturis dalam Ilmu Sejarah*.

fokus dalam penelitian. Sehingga penjelasan tentang dinamika sosial politik dan ekonomi Tasikmalaya, terhindar formalisme struktural.

Pendekatan struktural hanya akan digunakan pada bagian awal pembahasan tentang lanskap sosial politik dan ekonomi Tasikmalaya pada era kolonial. Hal tersebut dimaksudkan agar menemukan faktor determinan dalam pembentukan struktur sosial politik dan ekonomi di Tasikmalaya. Sehingga gambaran tentang struktur sosial di era kolonial yang *constraining*. Sehingga pada bagian ini pembahasan akan diarahkan pada analisis struktur kekuasaan, stratifikasi sosial, dan norma-norma yang menjadi landasan pembentuk struktur sosial. Pada bagian ini peneliti akan menganalisa kemungkinan agen sosial melakukan interaksi sosial yang dapat merubah struktur sosial politik dan ekonomi.

Pendekatan strukturalistik akan diterapkan sepenuhnya pada pembahasan soal perhimpunan pergerakan sosial politik dan ekonomi yang dibagi kedalam dua fase, masa non-kooperatif dan masa kooperatif. Penelitian akan mengidentifikasi agensi dalam perhimpunan pergerakan di Tasikmalaya 1912-1942, yang menjadi kekuatan otonom dari suatu struktur sosial yang memiliki kemampuan untuk mereproduksi maupun mentransformasi struktur sosial. Penelitian akan menganalisis Peristiwa yang mengandung kekuatan mengubah struktur sosial. Menjelaskan hambatan dalam struktur sosial (*constraint*) dan juga dorongan bagi tindakan perubahan (*enabeling*). Penelitian ini juga akan

berupaya menelaah *mentallite*, yakni faktor yang memotivasi, mendorong, menyalurkan, dan mendominasi tindakan-tindakan agen sosial. Artinya penelitian akan diarahkan pada analisis soal ide-ide dan ideologi dari setiap tokoh perhimpunan pergerakan. Terakhir, penelitian akan berusaha menjelaskan *causal power* yang mendorong perubahan dari hasil interaksi antara agen dengan struktur sosial.

F. Studi Pustaka

Tema riset sejarah pergerakan sosial politik dan ekonomi masa kolonial sangat mudah ditemukan. Misalnya, A.P.E. Korver menulis *Sarekat Islam 1912-1916*; Michael C. Williams menulis *Arit dan Bulan Sabit, Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*; Ruth T. McVey menulis *The Rise of Indonesia Communism*, yang gamblang menjelaskan kemunculan pergerakan komunisme di Indonesia pada zaman kolonial; dan Anton Lucas dkk. yang menulis *Radikalisme Lokal: Oposisi dan Perlawanan terhadap Pendudukan Jepang di Jawa (1942-1945)*. Selain karya-karya tersebut, ratusan studi sejarah bertema pergerakan zaman kolonial sangat mudah didapatkan. Namun riset pergerakan dengan lokus spesifik lokal Tasikmalaya akan sangat sulit ditemukan.

Fragmen sejarah kehidupan sosial politik dan ekonomi Tasikmalaya banyak yang terabaikan. Hampir semua penelitian tema pergerakan tidak membahas soal peristiwa sejarah yang terjadi di Tasikmalaya secara spesifik. Sebagian besar penelitian

tema pergerakan yang populer terfokus pada lingkup nasional atau satuan wilayah yang luas. Contohnya berbagai riset soal Sarekat Islam *afdeeling B* yang luput membicarakan *locus* Tasikmalaya yang menjadi tempat kelahiran gerakan ini. Demikian juga tokoh H. Ismail salah satu tokoh penggagas gerakan ini, hampir tidak ada yang membicarakannya. Akibatnya memungkinkan terjadi pemahaman yang salah dalam menjelaskan secara faktual Peristiwa Cimareme tahun 1919 dengan gerakan *Sarekat Islam afd. B*. Sampai hari ini, banyak sejarawan meyakini jika H. Hasan itu sangat identik dengan Sarekat Islam *Afd. B*. Padahal H. Hasan bukanlah aktifis Sarekat Islam.

Riset sejarah lokal Tasikmalaya yang membahas secara khusus dinamika perhimpunan pergerakan sosial politik dan ekonomi dalam rentang waktu 1912-1942, tidak banyak ditemukan. Satu-satunya karya sejarah yang relatif lengkap membahas tema tersebut adalah *Sejarah Kota Tasikmalaya 1820-1942* karya Miftahul Falah, diterbitkan oleh Uga Tatar Sunda/ Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, pada tahun 2010. Karya ini memberikan ruang pembahasan yang cukup luas untuk membahas dinamika politik dan ekonomi, masing-masing menjadi bab tersendiri.

Pembahasan mengenai dinamika politik masyarakat dalam *Sejarah Kota Tasikmalaya 1820-11942*, penulis hanya sebatas membahas perubahan pemerintahan dan wilayah administratif dan aktifitas politik masyarakat kota Tasikmalaya. Secara ringkas dan

padat penulis menjelaskan perubahan bentuk pemerintahan dan wilayah administratif Kota Tasikmalaya sejak masa Mataram reformasi pemerintahan lokal tahun 1925. Poin penting yang menjadi penekanan penulis adalah peningkatan fungsi politik Kota Tasikmalaya dari ibu kota distrik di bawah Kab. Sumedang menjadi ibu kota Kabupaten Sukapura. Sementara kajian mengenai aktifitas politik masyarakat kota Tasikmalaya, tampak belum dilakukan secara mendalam. Secara naratif, pembahasan soal pergerakan baru sebatas membahas eksistensi organ pergerakan. Demikian pula dalam pembahasan dinamika ekonomi, penulis tidak menjelaskan analisa mendalam.

Buku *Sejarah Kota Tasikmalaya 1820-1942* karya Miftahul Falah, telah memantik penulis untuk melakukan riset lanjutan. Maka penelitian ini merupakan karya sejarah lokal pertama yang membahas secara komprehensif kontruksi pergerakan sosial politik dan ekonomi, dalam rentang waktu 1912-1942, dengan lingkup spasial spesifik Tasikmalaya. Terlebih, penelitian ini mengeksplorasi kekayaan sumber sejarah lokal sebagai rujukan paling utama meskipun tidak mengabaikan sumber kolonial. Hal tersebut akan menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.